



**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI**  
**NOMOR 188.45/266 -DISKOMINFO/2019**  
**TENTANG**

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan panduan dan kerangka acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan para pemangku kepentingan dalam memberikan layanan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, perlu ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

2. Peraturan....

2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi;
3. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/149-Diskominfo/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
4. Berita Acara Nomor 478/415/Diskominfo/2019 tentang Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi tanggal 9 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, dengan daftar informasi dan dasar hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,



*Achmad Fahmi*  
ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 188.45/266 -DISKOMINFO/2019

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUKABUMI

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DAN DASAR HUKUMNYA

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM
1	2	3
1	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan pada Setiap Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
2	Disposisi Pimpinan pada Setiap Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
3	Dokumen Penawaran Peserta Pengadaan Barang atau Jasa Dengan Pengadaan Langsung	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan huruf j); 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4	Identitas Pribadi Seseorang atau Pihak Ketiga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
5	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
6	Data PNS yang Akan Diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
7	Hasil Tes Kompetensi Pejabat Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
8	Surat Usul Cerai, Surat Keputusan Cerai, atau Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian atau Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
9	Data Hasil <i>Check Up</i> Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
10	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
11	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai atau DRH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
12	Dokumen, Berkas, atau Arsip Dokumen ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
13	Surat Usul, Laporan, atau Pengaduan dari Perangkat Daerah tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)

1	2	3
14	Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara Permintaan Keterangan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
15	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
16	Surat Keputusan Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
17	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
18	Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset dan Pendapatan atau Rekening Bank PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
19	Identitas Lengkap Penderita HIV/AIDS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
20	Data Rekam Medis Pasien dan/atau Riwayat Kondisi dan Perawatan, Pengobatan Kesehatan Fisik dan Psikis Seseorang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)
21	Informasi tentang Akan Dilaksanakannya Penegakan Hukum	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
22	Harga Perkiraan Sendiri atau HPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan huruf j);</li> <li>2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.</li> </ol>
23	Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 30- sampai dengan Pasal 37)
24	Internet Protokol atau <i>IP Address Private</i>	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 30)
25	<i>Bandwith Management</i>	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 30)
26	Kode Akses Elektronik dan <i>User</i> atau <i>Password</i>	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 16)
27	Sistem Keamanan Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>
28	<i>Sistem Management Database</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf j);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ol>

1	2	3
29	<p>Laporan Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan Sistem;</li> <li>Pemeriksaan Kasus;</li> <li>Pemeriksaan Khusus;</li> <li>Review Laporan Keuangan;</li> <li>Evaluasi atau Pemantauan;</li> <li>Naskah Hasil Pemeriksaan atau NHP;</li> <li>Kertas Kerja Audit atau KKA atau Kertas Kerja Pemeriksaan atau KKP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat (6) huruf c dan Pasal 17 huruf i);</li> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03 Tahun 2008 tentang kode etik Pengawasan dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2007 tentang standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/No.4500;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ol>
30	<p>Identitas Korban Tindak Kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>
31	<p>Data Identitas Keluarga dan Indikator Kesejahteraan Keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf j);</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ol>
32	<p>Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, Intelektualisasi dan rekomendasi kemampuan seseorang PNS (Hasil tes, Assesment, Psikotes)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Kode etik psikologi.</li> </ol>
33	<p>Catatan yang Menyangkut Pribadi Seseorang yang Berkaitan dengan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal PNS (hasil diklat)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 ayat 1 huruf h)</p>
34	<p>Konsep Rencana Mutasi Rotasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2011.</li> </ol>
35	<p>Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Permohonan Izin;</li> <li>Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terakhir;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi;</li> <li>Surat Bukti Pemilikan Tanah;</li> <li>Akta Notaris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26 dan Pasal 32);</li> <li>Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 ayat 1 huruf h).</li> </ol>

1	2	3
36	<p>Arsip Digital Data Perusahaan Permohonan Izin meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. KTP Pimpinan, Direktur, atau Pemilik;</li><li>b. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak;</li><li>c. Akta Pendirian Perusahaan (Nomornya di Buka);</li><li>d. Ijazah Dan KTP Penanggung Jawab Bidang Teknik;</li><li>e. Surat Pengesahan Kehakiman atau Pendaftaran Pengadilan Negeri (Nomornya Dibuka);</li><li>f. Gambar Lokasi Tempat Usaha atau Gudang;</li><li>g. Gambar Situasi atau Sistem Rencana Konstruksif;</li><li>h. Gambar Atau Denah Tempat Usaha;</li><li>i. Sertifikat Tanah, Akta Jual Beli, Sewa Tanah Pernyataan Pemilik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26 dan Pasal 32);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 ayat 1 huruf h).</li></ul>
37	<p>Arsip Digital Data Pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gambar Alokasi;</li><li>b. Gambar Rencana;</li><li>c. Gambar Denah;</li><li>d. Gambar Instalasi Listrik, Air Minum, Air Kotor, dan sebagainya;</li><li>e. Gambar Konstruksi;</li><li>f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li><li>g. Uraian Rencana Proyek yang Akan di Sukabumi;</li><li>h. Peta Lokasi;</li><li>i. Peta Penggunaan Detail Tanah;</li><li>j. Peta Tata Ruang Lokasi;</li><li>k. Peta <i>Site Plan</i> atau Blok Plan;</li><li>l. Rencana Tahapan Pembangunan;</li><li>m. Photo Lokasi;</li><li>n. Izin Lain yang Diperyaratkan;</li><li>o. Surat Rekomendasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26 dan Pasal 32);</li><li>2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 ayat 1 huruf h).</li></ul>
38	<p><i>Database</i> Perizinan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nama dan Alamat Pimpinan;</li><li>b. Jumlah yang Dibayarkan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26 dan Pasal 32);</li><li>2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan Pasal 16 huruf b).</li></ul>

1	2	3
39	<p>Arsip Digital Data Perusahaan Permohonan Izin meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gangguan atau <i>Hinder Ordonatie</i>;</li> <li>b. Tanda Daftar Perusahaan;</li> <li>c. Tanda Daftar Gudang;</li> <li>d. Usaha Perdagangan;</li> <li>e. Usaha Industri;</li> <li>f. Tanda Daftar Industri;</li> <li>g. Usaha Jasa Konstruksi;</li> <li>h. Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>i. Izin Lokasi;</li> <li>j. Pengalihan Ruang Milik Jalan;</li> <li>k. Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;</li> <li>l. Penutupan Atau Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran;</li> <li>m. Pematangan Lahan atau Tanah;</li> <li>n. Pembuatan Jalan Masuk di Komplek Perumahan, Pertokoan dan Sejenisnya;</li> <li>o. Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame;</li> <li>p. Reklame;</li> <li>q. Penyelenggaraan Angkutan Trayek;</li> <li>r. Pengelolaan Tempat Parkir;</li> <li>s. Usaha Angkutan;</li> <li>t. Jasa titipan;</li> <li>u. Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air;</li> <li>v. Pengelolaan Air Bawah Tanah;</li> <li>w. Pengambilan Air Permukaan;</li> <li>x. Perubahan Alur Bentuk, Dimensi dan Kemiringan Dasar Sungai atau Saluran;</li> <li>y. Pembangunan Lintasan yang Berada di bawah atau di Atasannya;</li> <li>z. Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan lahan Pada Daerah Sampadan Sungai;</li> <li>aa. Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan Lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26 dan Pasal 32);</li> <li>2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf l dan Pasal 16 huruf b).</li> </ol>
40	<p>Proses dan Hasil Pengawasan Perbankan, Asuransi atau lembaga Keuangan Lainnya</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf e angka 6)</p>
41	<p>Hal-hal yang Berhubungan dengan Kerahasiaan Bank</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf j);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.</li> </ol>
42	<p>Rencana Pembelian Tanah dan Properti</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf e angka 4)</p>
43	<p>Biodata Tenaga Kerja Asing</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2013</p>



1	2	3
44	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 13 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang pengawasan perburuhan Nomor 23 Tahun 1984 Dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Pasal 5)
45	Kartu Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 13 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang pengawasan perburuhan Nomor 23 Tahun 1984 Dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Pasal 6)
46	Berita Acara Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Pasal 1 angka 2)
47	Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 ayat 1 dan Pasal 95A);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 83 ayat 2);</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (Pasal 59 sampai dengan Pasal 64).</li> </ol>
48	Dokumen Pertanahan : a. Akte Jual Beli Tanah b. Buku B Rincikan c. Kohir atau Leter C d. Verponsing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf g dan huruf h);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Poko-Pokok Agraria;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pembuatan Akta Tanah.</li> </ol>
49	Daftar Nama Siswa, Biodata, Kondisi Ekonomi, Sosial (terlibat dalam proses hukum), dan Nilai Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.</li> </ol>
50	Data Aset Tanah Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan yang Masih Dalam Proses Penetapan Status Sertifikat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf c)
51	Rencana Anggaran Keuangan yang Belum Disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf c)

1	2	3
52	Laporan Keuangan yang Belum Diverifikasi oleh Auditor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf c)
53	Data Jumlah Nominal Denda Tunggakan Pedagang atau Pengelola	Perjanjian Kerja Sama
54	Hasil Laporan Sementara Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf l);</li> <li>2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan Nomor PEWR/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern pemerintah, Bab/No.4500</li> </ol>
55	Register SP2D	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
56	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
57	Aset Tanah yang belum disertifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
58	Database Sewa tanah yang ditutup adalah nama penyewa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)
59	Dokumen, Berkas, atau Arsip Berita Acara Supervise ke Apotek, Pedagang Obat Eceran (PEO), Perusahaan Besar Farmasi (PBF), Klinik, Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Usaha Kecil Obat Traditional (UKOT)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6 ayat 13 huruf b dan huruf c)
60	Pembayaran Pajak yang Dilakukan oleh Masing-Masing Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak;</li> <li>2. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 (Bab 10 Pasal 83).</li> </ol>
61	Surat Menyurat Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>
62	Sistem Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c angka 6)
63	DP3, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Penilaian SKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;</li> <li>3. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Tahun 2013</li> </ol>

1	2	3
64	Dokumen Kontrak	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan j); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
65	Berkas-Berkas atau Data-Data yang Berkaitan Dengan Proses Penyelidikan dan Penyidikan pada Aparat Penegak Hukum dan/atau Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
66	Data Surat Perintah Penyegehan Yang Masih Dalam Proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
67	Data Surat Perintah Pengawasan Terhadap Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Masih Dalam Proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
68	Dokumen Teknis Izin Mendirikan Bangunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
69	Dokumen Pendataan Bangunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
70	Dokumen Rincian Bangunan Terkena Proyek Penghapusan Milik Pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
71	Dokumen Pertelaan Bangunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
72	Dokumen-Dokumen Pemberian Bantuan Teknis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
73	Dokumen Hasil Penilaian Terhadap Aset Pemerintah yang Akan Dihapuskan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
74	Dokumen Hasil Verifikasi SLF	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)
75	Arsip Keterangan Silsilah Waris	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)

Sukabumi, 31 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,



*Achmad Fahmi*  
ACHMAD FAHMI